
Dampak Intervensi Politik terhadap Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Birokrasi

Zalfa Lora Darwanto^{1*}, Audia Dara Puspita², Vera Artika Sari³, Azaka Alifa⁴, Aldo⁵, Azura Hersa Zahra Atira⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: ¹zlouraaa@gmail.com, ²audiadarapuspita510@gmail.com, ³veraarsa1@gmail.com,
⁴azaka6990@gmail.com, ⁵aldoprata0087@gmail.com, ⁶azurahersaz@gmail.com

Abstrak

Intervensi politik dalam birokrasi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk intervensi politik dalam birokrasi serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari politisasi jabatan, pengambilan kebijakan yang tidak objektif, hingga pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Dampaknya, distribusi pelayanan publik menjadi tidak merata dan cenderung diskriminatif, sementara profesionalisme aparatur terganggu akibat pengabaian sistem merit, melemahnya integritas dan netralitas ASN, serta menurunnya motivasi kerja. Kondisi ini pada akhirnya menghambat upaya reformasi birokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Kata Kunci: Intervensi Politik, Pelayanan Publik, Birokrasi

Abstract

Political intervention in the bureaucracy is a common phenomenon in Indonesia's system of government. This study aims to analyze the forms of political intervention in the bureaucracy and their impact on the quality of public services and the professionalism of civil servants. The method used is a descriptive qualitative approach based on a literature review of relevant sources. The results of the study indicate that political intervention manifests in various forms, ranging from the politicization of positions, the adoption of non-objective policies, to the mismanagement of budgets. Consequently, the distribution of public services becomes uneven and tends to be discriminatory. At the same time, the professionalism of civil servants is undermined due to the neglect of the merit system, the weakening of the integrity and neutrality of civil servants, and a decline in work motivation. These conditions ultimately hinder efforts at bureaucratic reform and erode public trust in government institutions.

Keywords: Political Intervention, Public Services, Bureaucracy

PENDAHULUAN

Secara umum, birokrasi adalah sistem organisasi pemerintahan atau lembaga yang dijalankan oleh aparat berdasarkan aturan, hierarki, dan prosedur yang baku dalam rangka menjalankan tugas dan pelayanan publik secara teratur dan sistematis. Birokrasi yang ideal memiliki ciri-ciri seperti pembagian tugas yang jelas, hierarki wewenang yang tegas, aturan tertulis, dan pegawai yang bekerja berdasarkan keahlian. Birokrasi menjadi instrumen yang sangat penting dan kehadirannya tidak dapat dielakkan di setiap negara, sebab di mana ada negara, di sana pasti ada birokrasi.

Namun, pelaksanaan birokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip idealnya. Salah satu faktor yang kerap mengganggu netralitas birokrasi adalah intervensi politik. Intervensi politik adalah tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan politik untuk masuk dan memengaruhi suatu sistem, keputusan, atau lembaga yang seharusnya berjalan secara independen. Intervensi ini dapat dilakukan oleh partai politik, pejabat, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin mengarahkan sebuah lembaga atau kebijakan agar menguntungkan pihak mereka, bukan berdasarkan aturan yang berlaku (Purna & Didin, 2022). Sebagian besar masyarakat memandang birokrasi pemerintah sebagai sistem yang penuh dengan prosedur rumit, memakan waktu, mengurus tenaga, dan berbiaya tinggi, sehingga dianggap tidak efektif bahkan cenderung tidak adil. Pandangan negatif ini

semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal tersebut, khususnya dalam hal penyelenggaraan layanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam kajian administrasi publik, birokrasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksana fungsi administratif semata, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menampung dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Konsep birokrasi Weberian dalam konteks Indonesia kontemporer terus menghadapi tantangan berupa intervensi dari luar sistem yang melemahkan prinsip-prinsip idealnya. Purna dan Didin (2022) menegaskan bahwa birokrasi Indonesia berada dalam ekosistem politik yang kompleks, di mana ketegangan antara kepentingan politik dan fungsi teknis administrasi tidak pernah sepenuhnya terselesaikan, sehingga birokrasi rentan menjadi instrumen kekuasaan alih-alih menjadi pelayan publik yang netral.

Dalam perspektif sistem merit, Kartika dkk. (2025) menunjukkan bahwa implementasi merit system di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang serius. Meskipun regulasi sistem merit telah tersedia secara formal, praktik pengangkatan dan promosi jabatan masih dipengaruhi oleh pertimbangan politis. Fenomena ini sejalan dengan temuan Syauket dan Meutia (2023) yang mengidentifikasi praktik jual beli jabatan sebagai salah satu area rawan korupsi yang secara sistematis mengganggu reformasi birokrasi dan merusak integritas institusi pemerintah. Dari sisi pelayanan publik, Shoimuna (2024) menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada sejauh mana aparatur mampu melepaskan diri dari tekanan politik. Raharja dkk. (2022) turut menekankan bahwa aparatur sipil negara yang terpapar tekanan politik cenderung mengalami penurunan motivasi intrinsik dan loyalitas organisasional, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Prasetyo dan Kurniawan (2021) mendokumentasikan bahwa tekanan politik terhadap ASN meningkat secara signifikan dalam periode pemilihan kepala daerah, di mana birokrasi lokal kerap dilibatkan dalam mobilisasi dukungan elektoral secara terselubung. Pola politisasi ini oleh Haris dan Wijaya (2023) diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur birokrasi. Pelayanan publik yang seharusnya diberikan secara adil dan merata berisiko menjadi diskriminatif akibat kepentingan politik yang menyelip masuk ke dalam sistem. Di sisi lain, profesionalisme aparatur negara juga terancam terkikis ketika promosi jabatan dan pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan pada kedekatan dengan penguasa. Penelitian ini berusaha mengkaji bentuk-bentuk intervensi politik yang terjadi dalam birokrasi serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur negara, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi upaya reformasi birokrasi yang lebih baik ke depannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Umumnya, data penelitian ini berbentuk narasi deskriptif, termasuk dokumen kuantitatif yang tetap bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan pengamatan peneliti terhadap lingkungan sosial subjek yang diteliti, mencakup aspek

kebahasaan, interaksi, maupun pemaknaan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan temuan penelitian secara terarah, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca, sekaligus memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang bermakna dari data yang diperoleh di lapangan. Metode deskriptif merupakan bagian tak terpisahkan dari karakteristik pendekatan kualitatif yang sangat diperlukan dalam penulisan laporan penelitian, karena memberikan penjelasan mendalam terhadap makna yang terkandung dalam setiap kata, konsep, maupun fenomena yang menjadi fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus: Mutasi ASN Pascapilkada Kota Bima

Salah satu contoh nyata intervensi politik dalam birokrasi terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pascapilkada, pemerintah daerah melakukan sejumlah mutasi dan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai lebih didasarkan pada kedekatan politik dibandingkan kompetensi dan kinerja. Beberapa pejabat yang dianggap tidak mendukung kepala daerah terpilih dipindahkan dari jabatan strategis, sementara individu yang memiliki hubungan politik lebih dekat memperoleh promosi jabatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya campur tangan politik dalam manajemen kepegawaian yang seharusnya berlandaskan sistem merit. Akibatnya, profesionalisme birokrasi mengalami penurunan karena proses pengangkatan dan promosi jabatan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan serta prestasi kerja aparatur. Selain itu, perubahan pejabat yang terlalu sering juga menghambat efektivitas pelayanan publik karena pejabat baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kasus ini menjadi contoh bagaimana intervensi politik dapat memengaruhi netralitas ASN, melemahkan profesionalisme birokrasi, dan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bentuk Intervensi Politik dalam Birokrasi

Intervensi politik dalam birokrasi di Indonesia terwujud dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan. Bentuk pertama dan paling dominan adalah intervensi dalam proses pengangkatan, promosi, dan mutasi jabatan birokrasi. Proses yang semestinya berlandaskan sistem merit dengan mengutamakan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi aparatur, dalam praktiknya kerap dipengaruhi oleh pertimbangan loyalitas dan afiliasi politik. Akibatnya, jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi didistribusikan bukan atas dasar kapabilitas, melainkan atas dasar kedekatan dengan aktor politik yang berkuasa. Kondisi ini sejalan dengan penerapan sistem merit di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius, terutama karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi politik dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan (Kartika dkk., 2025; Syauket & Meutia, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya bebas dari subjektivitas dan kepentingan kekuasaan.

Bentuk kedua adalah intervensi dalam proses pengambilan kebijakan administratif. Dalam kondisi ini, aktor politik berupaya mengarahkan produk kebijakan birokrasi agar selaras dengan

kepentingan politik mereka, sehingga birokrasi kehilangan otonominya dalam menjalankan fungsi teknis dan analitis. Bentuk ketiga adalah intervensi dalam tahap implementasi kebijakan. Program-program pemerintah dalam praktiknya sering diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, seperti memperkuat basis dukungan elektoral. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Adapun bentuk keempat adalah intervensi dalam pengelolaan anggaran. Dalam hal ini, alokasi belanja publik tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas pembangunan, melainkan cenderung diarahkan pada agenda politik jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi politik tidak hanya terjadi pada aspek struktural birokrasi, tetapi juga merambah ke aspek fungsional, mulai dari perumusan hingga implementasi kebijakan publik.

Dampak Intervensi Politik terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik memegang peran yang sangat penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur negara dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Namun demikian, intervensi politik dalam birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Ketika proses pengambilan dan implementasi kebijakan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan pada kepentingan politik tertentu, kualitas layanan yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Kebijakan yang terbentuk cenderung bersifat jangka pendek dan lebih responsif terhadap kepentingan politik sesaat, dibandingkan dengan upaya penyelesaian masalah publik secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem merit yang diterapkan secara konsisten mampu menciptakan birokrasi yang responsif, adaptif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat (Kartika dkk., 2025). Sebaliknya, ketika sistem merit terganggu oleh intervensi politik, kualitas pelayanan publik akan mengalami penurunan (Shoimuna, 2024). Intervensi dalam pengangkatan jabatan yang mengabaikan prinsip meritokrasi menyebabkan distorsi dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Pejabat yang tidak memiliki kompetensi menduduki posisi strategis, sementara individu yang lebih kompeten justru tidak memperoleh kesempatan yang layak. Kondisi ini secara langsung berdampak pada menurunnya efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, intervensi dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan menghasilkan kebijakan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya, distribusi pelayanan publik menjadi tidak merata dan berpotensi diskriminatif. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki kedekatan politik cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik (Shoimuna, 2024; Purna & Didin, 2022).

Intervensi dalam pengelolaan anggaran juga berdampak pada inefisiensi penggunaan keuangan negara. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dialokasikan untuk kepentingan politik jangka pendek. Secara keseluruhan, kondisi ini mengakibatkan menurunnya akuntabilitas birokrasi dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dampak Intervensi Politik terhadap Profesionalisme Aparatur Birokrasi

Profesionalisme birokrasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Profesionalisme tersebut tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis aparatur dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencakup aspek etika, integritas, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, aparatur

sipil negara dituntut untuk bekerja secara objektif, bebas dari tekanan eksternal, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip rasionalitas administratif. Oleh karena itu, keberadaan birokrasi yang profesional menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Intervensi politik menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya profesionalisme tersebut. Dalam praktiknya, sistem merit yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan aparatur negara belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Sistem merit pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja (Kartika dkk., 2025). Akan tetapi, adanya kepentingan politik dalam birokrasi menyebabkan prinsip-prinsip tersebut sering kali diabaikan. Padahal, sistem merit memiliki tujuan strategis dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas tinggi (Syauket & Meutia, 2023). Ketika sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, fondasi profesionalisme birokrasi pun menjadi lemah. Intervensi politik berdampak signifikan terhadap menurunnya objektivitas dalam pengembangan karier aparatur sipil negara. Dalam kondisi ideal, promosi jabatan seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki kinerja terbaik dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (Kartika dkk., 2025). Namun, dalam realitas birokrasi yang terpengaruh oleh kepentingan politik, proses promosi sering kali tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan meritokrasi (Syauket & Meutia, 2023). Aparatur yang memiliki kedekatan dengan aktor politik cenderung memperoleh prioritas dalam pengisian jabatan strategis, sementara individu yang memiliki kapasitas dan kinerja unggul justru terpinggirkan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam sistem karier ASN, tetapi juga menurunkan kualitas kepemimpinan dalam birokrasi secara keseluruhan.

Intervensi politik juga berimplikasi pada menurunnya integritas aparatur. Aparatur sipil negara yang berada dalam lingkungan birokrasi yang terpolitisasi cenderung menghadapi dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau mengikuti kepentingan politik tertentu. Dalam banyak kasus, tekanan politik dapat mendorong aparatur untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan kepentingan publik. Hal ini berpotensi memunculkan perilaku oportunistik, penyalahgunaan wewenang, serta praktik-praktik yang menyimpang dari norma etika birokrasi. Akibatnya, nilai-nilai integritas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelayanan publik menjadi semakin tergerus. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah hilangnya netralitas aparatur sipil negara. Netralitas merupakan prinsip fundamental dalam birokrasi modern, di mana ASN dituntut untuk tidak memihak pada kepentingan politik tertentu dan tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat (Prasetyo & Kurniawan, 2021). Namun, intervensi politik menyebabkan birokrasi tidak lagi sepenuhnya independen, melainkan terlibat dalam dinamika politik praktis. Keterlibatan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui tekanan dalam pelaksanaan kebijakan atau dukungan terhadap agenda politik tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar birokrasi yang menekankan pentingnya impersonalitas dan independensi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Intervensi politik juga berdampak pada menurunnya motivasi kerja aparatur. Dalam sistem birokrasi yang tidak berbasis merit, penghargaan terhadap kinerja menjadi tidak jelas dan tidak konsisten. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dan dedikasi terhadap pekerjaan cenderung merasa tidak dihargai ketika melihat bahwa promosi jabatan lebih ditentukan oleh faktor nonteknis, seperti kedekatan politik (Raharja dkk., 2022). Situasi ini dapat menimbulkan demotivasi, menurunkan semangat kerja, serta mengurangi produktivitas aparatur secara keseluruhan (Haris & Wijaya, 2023).

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan budaya kerja yang tidak sehat dan menghambat upaya reformasi birokrasi. Di sisi lain, penerapan sistem merit dalam birokrasi juga masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan indikator penilaian kinerja yang objektif, kurangnya dukungan sistem dan teknologi dalam manajemen kepegawaian, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang turut menghambat optimalisasi sistem merit. Kendala-kendala tersebut memperparah dampak intervensi politik, karena tidak adanya sistem yang kuat untuk menahan atau mengoreksi praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip meritokrasi. Akibatnya, upaya mewujudkan birokrasi yang profesional menjadi semakin sulit (Haris & Wijaya, 2023).

Secara keseluruhan, intervensi politik telah memberikan dampak yang sistemik terhadap profesionalisme birokrasi. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek individu aparatur, tetapi juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Birokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik yang netral dan profesional justru berpotensi menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh untuk memperkuat sistem merit, meningkatkan pengawasan, serta menegakkan prinsip netralitas ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Intervensi politik dalam birokrasi terbukti memberikan dampak yang sistemik dan serius, baik terhadap kualitas pelayanan publik maupun profesionalisme aparatur negara. Dari sisi pelayanan publik, intervensi politik menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak lagi berakar pada kebutuhan nyata masyarakat, melainkan cenderung diarahkan untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, distribusi layanan publik menjadi tidak merata dan berpotensi diskriminatif, di mana kelompok masyarakat yang tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan anggaran yang dibelokkan dari prioritas pembangunan turut memperburuk kualitas layanan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin melemah.

Dari sisi profesionalisme aparatur, intervensi politik merusak fondasi sistem merit yang seharusnya menjadi basis pengelolaan sumber daya manusia birokrasi. Proses rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan yang tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan kinerja menghasilkan distorsi dalam manajemen kepegawaian, menurunkan objektivitas pengembangan karier, serta mengikis integritas dan netralitas aparatur sipil negara. Lebih jauh, kondisi ini menimbulkan demotivasi di kalangan aparatur yang berdedikasi, memperlemah semangat kerja, dan dalam jangka panjang berpotensi menciptakan budaya birokrasi yang tidak sehat.

Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan mensyaratkan penguatan sistem merit secara konsisten, peningkatan pengawasan terhadap praktik politisasi birokrasi, serta penegakan prinsip netralitas ASN secara tegas. Tanpa langkah-langkah tersebut, birokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik yang profesional dan netral akan terus rentan menjadi alat kepentingan politik.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan sistem merit perlu dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada implementasinya, termasuk melalui pengembangan indikator penilaian kinerja yang objektif dan sistem teknologi manajemen kepegawaian yang transparan. Kedua, mekanisme pengawasan terhadap proses rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan ASN perlu diperkuat, baik oleh lembaga internal pemerintah maupun oleh lembaga independen, guna meminimalkan ruang bagi

intervensi politik. Ketiga, penegakan prinsip netralitas ASN harus disertai dengan perlindungan nyata bagi aparatur yang menghadapi tekanan politik, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa khawatir. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, misalnya melalui studi lapangan di berbagai daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola dan dampak intervensi politik dalam birokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2021). Birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 647-656.
- Haris, A., & Wijaya, R. (2023). Politisasi birokrasi dan hambatan reformasi: Perspektif aparatur sipil negara di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 112–129.
- Kartika, C., Azzahra, D. F., Ferrysca, N. A., & Alianinggrum, N. N. (2025). Birokrasi Dan Politik Dalam Tata Kelola Pemerintahan: Implementasi Sistem Merit Pada Kementerian Hak Asasi Manusia. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. . (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, 6(1), 30–41.
- Mahmud, I., Kadji, J., & Santoso, E. P. B. (2022). BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: RESPON TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO PERIODE 2017-2022. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(1), 1-22.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan implementasi netralitas PNS (kajian kekerasan simbolik dalam pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 9.
- Prasetyo, B., & Kumiawan, T. (2021). Netralitas ASN dalam pilkada: Tantangan dan solusi kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–62.
- Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?. *Jurnal Arajang*, 5(1), 76-98.
- Raharja, S., Nugroho, H., & Santoso, T. (2022). Dampak politisasi birokrasi terhadap motivasi dan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 211–230.
- Shoimuna, M. D. (2024). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. *Public Service And Governance Journal*, 5(1), 239-257.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).